

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku :

- Abdurrahman, 1985. *“Tebaran Pikiran mengenai Hukum Agraria”* Bandung : Alumni.
- Adolf, Huala, 2004. *“Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional”* Jakarta : Sinar Grafika.
- Ali, Achmad, 2012. *“Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence); termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)”* Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- , Achmad, 2008. *“Menguak Realitas Hukum; Rampai Kolom & Artikel Pilihan dalam Bidang Hukum”* Jakarta : Kencana Media Group.
- , Achmad, 2005. *“Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan Solusinya)”* Bogor : Ghalia Indonesia.
- Achmad, Wiwie Heryani, 2012. *“Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata”* Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Ali, Zainuddin, 2009. *“Metode Penelitian Hukum”* Jakarta : Sinar Grafika.
- Zainuddin, 2009. *“Filsafat Hukum”* Jakarta : Sinar Garfika.
- Asshiddiqie, Jimly, 1994. *“Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia”* Ichtiar Baru Van Hoeve : Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, 2012. *“Teori Hukum Integratif, Rekontruksi terhadap Teori Hukum Progresif dan Teori Hukum Pembangunan”* Yogyakarta : Genta Publishing.
- Arrasjid, Chainur, 2006. *“Dasar-dasar Ilmu Hukum”* Jakarta : Sinar Grafika.
- B. Taneko, Soleman, 1993. *“Pokok-pokok Studi Hukum dalam Masyarakat”* Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Emirzon, Joni, 2000. *“Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase)”* Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Hadimulyo, 1997. *“Mempertimbangkan ADR, Kajian Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan”* Jakarta : ELSAM.

- Hadjon, Phillipus M, 1987. *“Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia”* Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Hutagalung, Sophar Maru, 2012. *“Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”* Jakarta : Sinar Grafika.
- Harsono, Boedi, 1995. *“Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya”* Jakarta : Djambatan.
- Kusumaatmadja, Mochtar, 2002. *“Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan”* Bandung : PT. Alumni.
- Limbong, Dayat. 2006. *“Penataan Lahan Usaha PK-5 ketertiban VS Kelangsungan Hidup”*. Medan Pustaka Bangsa Press.
- Lubis, M. Solly, 1994. *“Filsafat dan Penelitian”* Bandung : Bandar Maju.
- Majelis Adat Aceh dan UNDP, 2008. *“Pedoman Peradilan Adat di Aceh : untuk Peradilan Adat yang Adil dan Akuntabel”* Banda Aceh.
- Margono, Suyud, 2004. *“ADR (Alternatif Dispute Resolution) & Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum”* Bogor : Ghalia Indonesia.
- Manan, Abdul, 2005. *“Aspek-aspek Pengubah Hukum”* Jakarta : Kencana Prenada Media.
- Mertokusumo, Sudikno, 2002. *“Penemuan Hukum sebuah Pengantar”* Yogyakarta : Liberty.
- , Sudikno, 2005. *“Mengenal Hukum Suatu Pengantar”* Yogyakarta : Liberty.
- , Sudikno, 1982. *“Hukum Acara Perdata Indonesia”* Yogyakarta : Liberty.
- Murad, Rusmadi, 1999. *“Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah”* Bandung : Alumni.
- , Rusmadi, 2007. *“Menyingkir Tabir Masalah Pertanahan : rangkaian Tulisan dan Materi Ceramah”* Bandung : CV Mandar Maju.
- Parlindungan, A.P. 1984. *“Serba-serbi Hukum Agraria”* Bandung : Alumni.
- , A.P. 1998. *“Komentar atas Undang-Undang Pokok Agraria”* Bandung : CV. Mandar Maju.

- ,A.P. 1990. "*Konversi Hak-hak atas Tanah*" Bandung : CV. Mandar Maju.
- R. Tjitrosudibio, R. Subekti, 1985. "*Kitab Undang-undang Hukum Perdata*" Jakarta : Pradnya Paramita.
- Ruchiyat, Eddy, 2006. "*Politik Pertanahan Nasional sampai Orde Reformasi*" Bandung : Alumni.
- Runtung, 2006. "*Pemberdayaan Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia*" Pidato Guru Besar FH-USU, Medan : USU Press.
- Santoso, Urip, 2012. "*Hukum Agraria Kajian Komprehensif*" Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- ,Urip, 2005. "*Hukum Agraria & Hak-hak Atas Tanah*" Jakarta : Kencana Prenada Media Gorup.
- Sembiring, Jimmy Joses, 2011. "*Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsoliasi, & Arbitrase)*" Jakarta : Visi Media.
- Sitorus, Oloan Darwinsyah Minin, 2006. "*Cara Penyelesaian Karya Ilmiah di Bidang Hukum (Panduan Dasar Menuntaskan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)*" Yogyakarta : MKT Indonesia.
- Sudiyat, Iman, 1982. "*Beberapa masalah Penguasaan Tanah di berbagai Masyarakat sedang berkembang*" Yogyakarta : Liberty Yogyakarta.
- Sutedi, Adrian, 2007. "*Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftarannya*" Jakarta : Sinar Grafika.
- Sunggono, Bambang, 1997. "*Metodelogi Penelitian Hukum*" Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Sumardjono, Maria S.W, 2008. "*Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial Budaya*" Jakarta : Kompas.
- Soekanto, Soejono, Sri Mamudji, 2011. "*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,*" Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada 2011.
- Thalib, Hambali 2009. "*Sanksi Pidana dalam Konflik Pertanahan Kebijakan Alternatif Penyelesaian Konflik Pertanahan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*" Jakarta : Kencana Media Group.
- Umam, Khotibul, 2010. "*Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*" Yogyakarta : Pustaka Yustisia.

Usman, Rachmadi, 2012. *“Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik”* Jakarta : Sinar Grafika.

Widjaja, Gunawan, 2002. *“Alternatif Penyelesaian Sengketa”* Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Winarta, Frans Hendra, 2012. *“Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional”* Jakarta : Sinar Grafika.

-----,Frans Hendra, 2012. *“Hukum Penyelesaian Sengketa”* Jakarta : Sinar Grafika.

Yamin, Muhammad, 2006. *“Problematika Mewujudkan jaminan Kepastian Hukum atas Tanah dalam Pendaftaran Tanah”* Medan : USU Press, Pidato Guru Besar.

#### **B. Disertasi dan Tesis :**

Affandi, Rifai, 2013. *“Penyelesaian Sengketa Penguasaan Tanah Hak Guna Usaha (HGU) Perkebuna Kelapa Sawit antara PT. Ubertracon/Nafasindo dengan Masyarakat (Suatu Penelitian di Kabupaten Aceh Singkil)”* Banda Aceh : Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Volume 2, No. 2 November.

Doly, Denico, 2014. *“Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Alternative Dispute Resolution (ADR)”* Info Singkat Hukum, Jakarta : Sekretariat DPR RI.Vol.VI.No 01/I/P3DI/Januari.

Mua'di, Sholih, 2008. *“Penyelesaian Sengketa Hak atas Tanah Perkebunan melalui cara Nonlitigasi (Suatu Studi Litigasi dalam Situasi Transisional)”* Semarang : Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

Gusvita, Gusvita, 2012. *“Hambatan Pelaksanaan Ganti Rugi tanah untuk pembangunan pusat Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur”* Medan : Tesis Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara.

Taqwaddin, 2010. *“Penguasaan atas Pengelolaan Hutan Adat oleh Masyarakat Hukum Adat (Mukim) di Provinsi Aceh”* Medan : Disertasi Doktor Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara.

Putu Suryani, Luh, 2011. *“Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar dalam rangka Penatagunaan Ruang Tanah di Kota Denpasar”* Tesis : Magister Ilmu Hukum Universitas Udayana, Denpasar.

Vidwati, Tias, 2009. *“Peranan Kepala Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah (Studi kasus pada Suku Dayak Tobak Desa Tebang Benua Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat)”* Semarang : Tesis Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.

### **C. Jurnal/Hasil Penelitian//Makalah Ilmiah :**

Azam, Syaiful, 2003. *“Eksistensi Hukum Tanah dalam mewujudkan tertib Hukum Agraria”* Makalah Fakultas Hukum USU – Digitized by USU Digital Library.

Budiman, Elfachri, 2005. *“Peradilan Agraria (Solusi Alternatif penuntasan Sengketa Agraria)”* Jurnal Hukum USU Vol. 01. No.1.

Ginting, Darwin, Adharinalti, dkk. 2012. *“Laporan Akhir Penelitian”* Juni.

Djauhari, 2006. *“Kajian Teori Welfare State dalam perspektif Barat dan Islam”* Jurnal Hukum Vol. XVI, No. 1 Maret.

Fauzi Rachman, Noer, 2013. *“Rantai Penjelaras Konflik-Konflik Agraria yang Kronis, Sistematis, dan Meluas di Indonesia”*. Bhumi, Jurnal Ilmiah Pertanahan PPPM – STPN, Nomor 37 Tahun 12, April.

Iswantoro, 2013. *“Dilematika Sengketa Pertanahan dan Penyelesaiannya dalam perspektif hukum Positif.”* Jurnal : Supremasi Hukum Vol 2. No.1 Juni.

Purba, Hasim, 2010. *“Reformasi Agraria dan Tanah untuk Rakyat : Sengketa Petani VS Perkebunan”* Jurnal Law Review, V. X No 2. Universitas Pelita Harapan.

Rahmadaini, 2013. *“Pelaksanaan Penertiban Tanah terlantar di Provinsi Aceh”* Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Volume 2 Vol. 2. November.

Sihotang, Mangatas, Tan Kamello, Muba Simanihuruk, 2006. *“Kajian Mediasi sebagai Kebijakan Hukum dalam menyelesaikan Konflik perkara Perdata di Pengadilan Negeri/Niaga dan HAM kelas 1A Medan”* Jurnal Studi pembangunan USU Volume 1 Nomor 2.

- Sodiki, Achmad, 2012. “*Kebijakan Pertanahan dalam penataan Hag Guna Usaha untuk sebesar-besar Kemakmuran Rakyat*” Makalah disampaikan pada Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Jakarta : 13 Maret.
- Sumarto, 2012. “*Penanganan dan Penyelesaian Konflik Pertanahan dengan Prinsip Win-Win Solution oleh Badan Pertanahan nasional RI*” Disampaikan pada Diklat Direktorat Konflik Pertanahan Kemendagri RI tanggal 19 September.
- Supriyanta, 2013. “*Peranan Mekanisme Penyelesaian Sengketa untuk mendukung Visi Indonesia 2030*” Makalah : <http://ejournal.unisri.ac.id>.
- Mahdi, 2011. “*Eksistensi Peradilan Adat di Aceh*” Hunafa : Jurnal Studia Islamika, STAIN Malikussaleh Lhokseumawe.
- Marbun, Supardy, 2005. “*Persoalan Areal Perkebunan pada Kawasan Kehutanan*” Jurnal Hukum USU Vol. 01, No.1.
- Muryati, Dewi Tuti, B. Rini Heryani, 2011. “*Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi di Bidang Perdagangan*” Jurnal Dinamika Sosbud, V. 13, 1 Juni.
- Widiyanto, 2013. “*Potret Konflik Agraria di Indonesia*” Bhumi, Jurnal Ilmiah Pertanahan PPPM – STPN, Nomor 37 Tahun 12.
- Kantor Bupati Nagan Raya, 2013. “*LAKIP Kabupaten Nagan Raya*” Suka Makmue.
- Kantor Bupati Nagan Raya, 2012. “*Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Nagan Raya*” Suka Makmue.
- Oxfam, 2006. “*Hak Atas Tanah di Aceh setelah dua tahun Tsunami*” Laporan Briefing Oxfam : 30 November.
- Tim Riset RALAS, 2008. “*Reconstruction of the Aceh Land Administration system (RALAS) yang dibiayai oleh Bank Dunia*” INFID : Working Paper No. 3.

#### **D. Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Perkebunan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-badan Hukum yang dapat mempunyai Hak Milik atas Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Pulau Sumatera.

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat.

Qanun Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintah Mukim dalam Provinsi Nanggoe Aceh Darussalam

Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Nanggor Aceh Darussalam.

Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.

Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Peraturan Kepala BPN Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Subbagian dan Seksi pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Uraian Tugas Urusan dan Subseksi pada Kantor Pertanahan

Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan.

Keputusan BPN RI Nomor 21 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 34 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan.

Petunjuk Teknis BPN Nomor 01/JUKNIS/D.V/2007 tentang Pemetaan Masalah dan Akar Masalah Pertanahan.

Petunjuk Teknis BPN Nomor 05/JUKNIS/D.V/2007 tentang Mekanisme Pelaksanaan Mediasi.

#### **E. Media Massa/Internet :**

Harian Serambi Indonesia, "*Sekdakab Nagan Raya : Selesaikan Sengketa Tanah secara Musyawarah* " tanggal 21 Maret 2011.

-----Serambi Indonesia, "*Warga Darul Makmur Demo Bupati Nagan Raya : Tuntut Penuntasan Sengketa Lahan 2.000 Hektare*" tanggal 1 Desember 2011.

-----Serambi Indonesia, "*Warga Demo Kantor Camat Darul Makmur : Minta Sengketa Lahan Dituntaskan*" tanggal 12 April 2013.

-----Serambi Indonesia, "*Warga Sandera Truk Sawit : Milik PT. SPS*" tanggal 20 April 2013.

-----Serambi Indonesia, "*PT. SPS Verifikasi SKT Warga Kayee Unoe : Terkait Sengketa Lahan 2.000 Hektare*" tanggal 29 April 2013.



-----Serambi Indonesia, “*Pendudukan Kebun PT ASN Berlanjut*” tanggal 17 Januari 2014.

Kerjasama Harian Serambi Indonesia dan IDLO, “*Peran Mediator dalam Penyelesaian Sengketa (Tinjauan dalam Adat Aceh)*” Di akses dari [http://www.idlo.int/English/ External/IPacehnews.asp](http://www.idlo.int/English/External/IPacehnews.asp) tanggal 27 Februari 2014.

-----Harian Serambi Indonesia dan IDLO, “*Menyelesaikan Sengketa Pertanahan untuk Pembangunan*” Di akses dari <http://www.idlo.int/English/External/IPacehnews.asp> tanggal 28 Februari 2014.

